

## BAB I

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

**R**encana Kerja (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

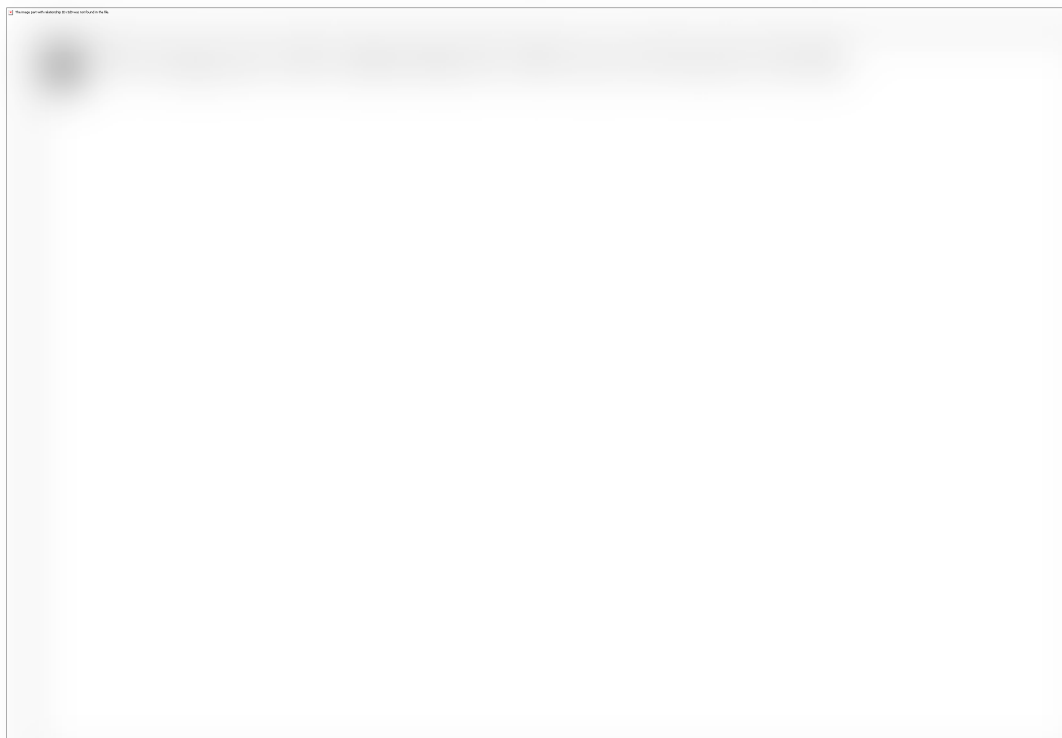
Sebagai sebuah dokumen resmi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung yang menjadi satu kesatuan untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2019-2023 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja PD pada tahun 2020 ini merupakan tahun ke dua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung menyusun Renja Dinas Perhubungan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Dinas Perhubungan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2021 dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja PD (Renja PD) Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini:



Gambar 1 : Diagram Alir Penyusunan Renja PD

### Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung sampai dengan bulan Juni 2018 memiliki pegawai sebanyak 446 orang. Adapun kondisi kepegawaian berdasarkan eselon jabatan:

#### Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II B	Eselon III A	Eselon III B	Eselon IV A	Eselon IV B	Jlh
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang			4			4
4	Kasubbag/Kasie/Ka UPT				18		18
5	Kasubbag TU UPT					3	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>27</b>



Sumber :Subbag Umum dan Kepegawaian Dishub

Jumlah pegawai eselon II sebanyak 1 pegawai yaitu Kepala Dinas. Pegawai eselon III sebanyak 5 orang yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi, Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir, Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi dan pegawai eselon IV sebanyak 21 orang yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasubag Program Data dan Informasi, Kasi Perencanaan dan Evaluasi Transportasi, Kasi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi, Kasi Bina Transportasi, Kasi Manajemen Transportasi, Kasi Manajemen Perparkiran, Kasi Manajemen Angkutan, Kasi Ketertiban Transportasi, Kasi Pengamanan dan Pengawasan, Kasi Pengaturan Transportasi, Kasi Perlengkapan jalan, Kasi Sarana Angkutan, Kasi Prasarana, Kepala UPT Pengelolaan Terminal, Kepala UPT Angkutan, Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran, Kasubbag TU UPT Pengelolaan Terminal, Kasubbag TU UPT Angkutan dan Kasubbag TU UPT Pengelolaan Perparkiran. Pelaksana sebanyak 444 orang.

### Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1/ D4	D1- D3	SLTA	SLTP	SD	Jlh
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris		1						1
3	Kepala Bidang		4						4
4	Kasubbag		1	2					3
5	Kepala Seksi		2	9					11
6	Kepala UPT		2						2
7	Kasubbag TU UPT		1	2					3
8	Pelaksana		3	91	8	165	19	7	293
<b>JUMLAH</b>			<b>20</b>	<b>104</b>	<b>8</b>	<b>165</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>318</b>
	%		<b>4,7</b>	<b>32,7</b>	<b>2,5</b>	<b>51,9</b>	<b>6,0</b>	<b>2,2</b>	<b>100</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dishub Kota Bandung



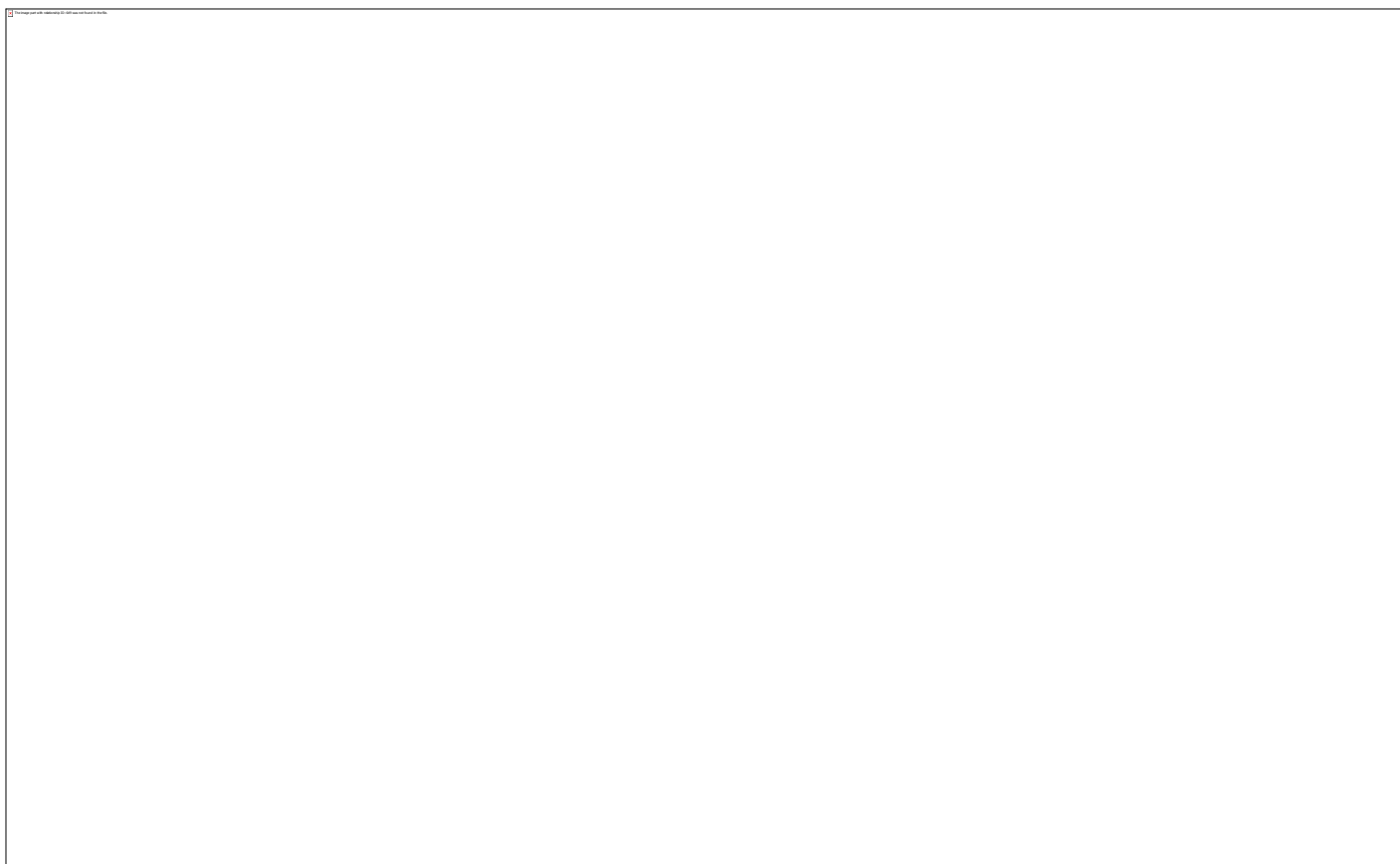
Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung, sebanyak 20 orang (4,7%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kasubbag, 2 orang Kepala Seksi, 2 orang Ka UPT, 1 orang Kasubbag TU UPT dan 3 orang Pelaksana, sedangkan sebanyak 104 orang (32,7%) memiliki pendidikan S1/D4, yaitu 2 orang Kasubbag, 9 orang Kepala Seksi, 2 orang Kasubbag TU UPT dan 91 orang pelaksana. Pegawai yang memiliki pendidikan D1-D3 sebanyak 8 orang (2,5%), 8 orang pelaksana, untuk pegawai lulusan SLTA 165 orang (51,9%), Lulusan SLTP 19 orang (6,0%), lulusan SD 7 orang (2,2%).

Dinas Perhubungan Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan. Sebagai bagian dari unsur pelaksana Pemerintah Daerah, secara struktural Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung diangkat dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. Adapun kondisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung secara umumnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi berikut ini:



## **STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG**

Lampiran: Peraturan Daerah Kota Bandung  
Nomor :  
Tanggal :



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi:
  - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b). Sub Bagian Keuangan
  - c). Sub Bagian Program data dan Informasi
2. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi, membawahi:

- a). Seksi Perencanaan dan Evaluasi Transportasi.
  - b). Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi.
  - c). Seksi Bina Transportasi.
3. Bidang Manajemen Transportasi dan parkir, membawahi:
    - a). Seksi Manajemen Transportasi.
    - b). Seksi Manajemen Perparkiran.
    - c). Seksi Manajemen Angkutan.
  4. Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi, membawahi:
    - a). Seksi Ketertiban Transportasi.
    - b). Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
    - c). Seksi Pengaturan Transportasi.
  5. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahi:
    - a). Seksi Perlengkapan jalan.
    - b). Seksi Sarana angkutan.
    - c). Seksi Prasarana.
  6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum pembuatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi PD;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
  - h. Permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
  - i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
  - j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021 ini, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban. Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021 ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandung.

#### **b. Tujuan**



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2021 ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja APBD sudah disahkan.



- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.  
Bab ini membahas telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Bab ini membahas Program dan Kegiatan serta pendanaannya.
- Bab V Penutup  
Bab ini memuat uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2019**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

**P**encapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap pelaksanaan program kerja tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2019 disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini:



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan**  
**Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung s/d Tahun 2019**

Nama PD : Dinas Perhubungan Kota Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) / kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2020)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7)/(6)	9	10=5+7+9	11=10/4			
2													
2	09												
2	09	01			100%	20%	20%	100%	20%	40%			
2	09	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan pelayanan surat menyurat (laporan )	60		12	12	100	12	24	40%
2	09	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik (laporan)	60		12	12	100	12	24	40%



2	09	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (laporan )	60		12	12	100	12	24	40%
2	09	01	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK (laporan )	60		12	12	100	12	24	40%
2	09	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Pengadaan Cetakan (Jenis )	20		4	2	50	4	6	30%
2	09	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan (laporan )	60		12	12	100	12	24	40%
2	09	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan (laporan)	60		12	12	100	12	24	40%
2	09	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman (laporan )	60		12	12	100	12	24	40%
2	09	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah (laporan )	60		12	12	100	12	24	40%
2	09	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Laporan penyediaan jasa pengamanan kantor (laporan )	60		12	12	100	12	24	40%
2	09	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (%)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>92,50%</b>	<b>92,50%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	40%
2	09	02	05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	55			0	0%	2	2	3,64%



2	09	02	10	Pengadaan mebeulair	Tersedianya Mebeulair Dinas (set)	5		1	1	100	1	1	40%
2	09	02	12	Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur (set)	5		1	0,5	50	1	1	40%
2	09	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (laporan)	60		12	12	100	12	12	40%
2	09	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara (laporan)	60		12	12	100	12	12	40%
2	09	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor yang memadai (set)	5		1	1	100	1	1	40%
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Peresentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai (%)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	09	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stel)	2235		447	447	100	447	447	40%
2	09	03	02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (stel)	770		154	154	100	154	154	40%



2	09	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>								
2	09	05	01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Terdidiknya aparatur Dishub (orang)	250		19	13	68,42%	50	50	100%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7)/(6)	9	10=5+7+9	11=10/4
2	09	17		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Persentase penumpang sarana angkutan umum (%)</b>	<b>21%</b>		<b>20%</b>	<b>20,14%</b>	<b>100,70%</b>	<b>20,25%</b>	<b>18,25%</b>	<b>86,90%</b>
2	09	17	06	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah tenaga keamanan di lingkungan terminal (orang)	60		12	12	100%	-	-	-
2	09	17	09	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	Jumlah tenaga kebersihan di lingkungan terminal (orang)	275		55	55	100%	55	55	100%
2	09	17	16	Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Laporan hasil koordinasi (laporan)	20		4	4	100%	4	4	100%
2	09	17	31	Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan Angkutan Massal/ Bus Line	Pengoperasian Angkutan Massal (koridor)	20		5	5	100%	5	5	100%
2	09	17	32	Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Bike Sharing	Jumlah station bike sharing yang beroperasi (station)	150		30	30	100%	30	30	100%
2	09	17	33	Kegiatan Pengoperasian dan	Jumlah koridor bus	20		4	4		4	4	



				pemeliharaan Angkutan Massal/Bus Sekolah	sekolah yang beroperasi (koridor)					100%			100%
2	09	18		<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Persentase Sarana prasarana transportasi yang terbangun</b>	<b>100%</b>		<b>20%</b>	<b>25,19%</b>	<b>125,95%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	
2	09	18	'07	Kegiatan Pembangunan Sarana bike sharing	Sarana bike sharing yang terbangun (buah)	5		1	1	100%	1	1	100%
2	09	18	11	Kegiatan Pengadaan sarana angkutan umum / khusus	Sarana angkutan umum / khusus yang tersedia (unit)	15		3	2	100%	3	3	100%
2	09	18	12	Kegiatan Pembangunan jembatan penyeberangan orang	Jembatan penyeberangan orang yang dibangun (unit)	5		1	0	100%	1	1	100%
2	09	18	14	Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal	Terminal yang direhabilitasi/pemeliharaan (lokasi)	5		1	4	100%	1	1	100%
2	09	18	15	Kegiatan Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan	Jumlah shelter angkum dan shelter sepeda yang terpelihara (lokasi)	25		5	5	100%	5	5	100%
2	09	18	16	Kegiatan Pengadaan perlengkapan angkutan	Terbangunnya signage angkot stop (buah)	70		14	14	100%	14	14	100%
2	09	18	17	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Terminal Angkutan Darat	Sarana Prasarana terminal yang meningkat (lokasi)	5		1	1	100%	1	1	100%
2	09	18	18	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi Terintegrasi ?BITS?	Sarana prasarana BITS yang terbangun (set)	5		1	0	100%	1	1	100%
2	09	18	19	Kegiatan Pengadaan prasarana angkutan umum / khusus	prasarana angkutan umum / khusus yang terbangun (set)	5		1	0	0%	1	1	100%





2	09	19		<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun</b>	<b>100%</b>		<b>20%</b>	<b>27,40%</b>		<b>40%</b>	<b>40%</b>		
2	09	19	01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas (buah)	3868		380	819	178%	380	380	100%	
2	09	19	02	Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya marka jalan (m')	318450		102.000	147.002	127%	102.000	102.000	100%	
2	09	19	03	Pengadaan pagar pengaman Jalan	Pagar pengaman jalan yang terpasang (unit)	456		100	112	112%	100	100	100%	
2	09	19	06	Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain	Tersedianya Paku Jalan (buah)	6827		1500	1.500	100%	1500	1500	100%	
2	09	19	06	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Jumlah cermin tikungan yang terpasang (buah)	273		60	60	100%	60	60	100%	
2	09	19	15	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan /Warning Light	Jumlah Lampu Peringatan Warning light yang terpasang (buah)	91		20	21	105%	20	20	100%	
2	09	20		<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase kendaran umum yang lulus uji</b>	<b>91%</b>		<b>90%</b>	<b>85,57%</b>	<b>95,52%</b>	<b>90,25%</b>	<b>90,25%</b>	100%	
2	09	20	03	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Uji petik kendaraan bermotor (kali)	30		6	6	100	6	6	100%	



2	09	20	'04	Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Bukti tanda uji yang tersedia (set)	15		3	3	100	3	3	100%
2	09	20	'05	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara (set)	5		1	1	100	1	1	100%
2	09	20	'07	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terbangun (unit)	5		1	0	100	1	1	100%
2	09	20	08	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor	Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara (set)	5		1	1	100	1	1	100%
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>22</b>		<b>Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>	<b>Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertanganin</b>	<b>100%</b>		<b>20%</b>	<b>20,00%</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
2	09	22	06	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Car Free Day / Car Free Night	Laporan koordinasi (laporan)	10		2	2	100%	2	2	100%
2	09	22	07	Kegiatan Koordinasi pengaturan lalu lintas	Laporan pengaturan lalu lintas (laporan)	60		12	12	100%	12	12	100%
2	09	22	08	Kegiatan Kampanye publik keselamatan jalan	Jumlah Kampanye publik (kali)	20		4	6	100%	4	4	100%
2	09	22	09	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	Jumlah penertiban angkutan di jalan raya (kali)	1200		240	240	100%	240	240	100%
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>24</b>		<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan</b>	<b>100%</b>		<b>20%</b>	<b>19,49%</b>	<b>97,44%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
2	09	24	01	Kegiatan Perencanaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	Dokumen perencanaan (dokumen)	50		19	19	100%	19	19	100%
2	09	24	02	Kegiatan Perencanaan Pengembangan dan Penataan Sistem Transportasi Kota	Dokumen perencanaan (dokumen)	45		10	10	100%	10	10	100%



2	09	24	03	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pengukuran Kinerja Transportasi	Laporan kinerja transportasi (dokumen)	50		10	10	100%	10	10	100%
2	09	25		<b>Program Pembinaan Transportasi</b>	<b>Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan</b>	<b>2%</b>		<b>1%</b>	<b>1,03%</b>	<b>100,30%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,25%</b>	<b>100%</b>
2	09	25	01	Kegiatan Pembinaan dan Edukasi Transportasi Ramah Lingkungan (Eco Transport)	Edukasi eco transport (kali)	30		6	5	100%	6	6	100%
2	09	25	02	Kegiatan Pembinaan dan Kampanye Kebijakan di bidang perhubungan	Kampanye publik (kali)	30		6	4	100%	6	6	100%
2	09	26		<b>2.09.2.09.01.01.26 - Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir</b>	<b>Persentase kinerja APILL dan parkir</b>	<b>80%</b>		<b>70%</b>	<b>89,18%</b>	<b>128,26%</b>	<b>72,5%</b>	<b>72,5%</b>	<b>100%</b>
2	09	26	01	Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)	ATCS yang dipelihara (titik)	137		137	137	100%	137	137	100%
2	09	26	02	Kegiatan Pengadaan perlengkapan fasilitas dan petugas Parkir	Perlengkapan juru parkir (stel)	8870		1774	1.000	56,37%	1774	1774	100%
2	09	26	03	Kegiatan Pengadaan Marka Parkir	Jumlah marka parkir yang tersedia (m')	12710		2800	2.800	100%	2800	2800	100%
2	09	26	04	Kegiatan Pemeliharaan dan operasional sarana prasarana parkir	Jumlah mesin parkir yang beroperasi (unit)	443		443	443	100%	443	443	100%
2	09	27		<b>Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Badan Layanan Umum Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Transportasi</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	09	27	01	Kegiatan Pelayanan BLUD (Angkutan)	Laporan Pelayanan Angkutan (laporan)	60		12	12	100%	12	12	100%
2	09	27	02	Kegiatan Pelayanan BLUD	Laporan Pelayanan Parkir	48				100%	12	12	100%



*Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021*

---

				(Parkir)		(laporan)													
--	--	--	--	----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dalam pelaksanaan Renja tahun 2019 realisasi target dapat tercapai, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target yaitu : kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan aparatur, Pendidikan dan Kegiatan Pengadaan perlengkapan fasilitas dan petugas Parkir.

Untuk kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan aparatur dari target 1 set hanya dapat terealisasi sebanyak 0,5 set, sedangkan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dari target 19 orang, dapat direalisasikan sebanyak 13 orang dan Kegiatan Pengadaan perlengkapan fasilitas dan petugas Parkir dari target 1774 stel hanya dapat terealisasikan sebesar 1000 stel. Target tersebut tidak dapat tercapai karena adanya beberapa kendala dalam proses pengadaan barang jasanya dan juga ada rasionalisasi anggaran.

Dinas Perhubungan Kota Bandung akan tetap berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi perkembangan selanjutnya. Hal tersebut akan terus dilakukan sebagai upaya untuk tercapainya sinergitas antar stake holder. Setiap perkembangan yang terjadi akan terus dipantau dan diselaraskan dengan kondisi yang ada sehingga lambat laun akan tercapai sistem transportasi yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai lembaga teknis dalam bidang perhubungan, dituntut untuk mampu menyediakan fasilitas sarana prasana transportasi di Kota Bandung yang memadai, mampu memberikan pelayanan yang aman dan lancar bagi masyarakat di Kota Bandung pada umumnya sehingga secara aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota Bandung (*welfare state*).

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan dalam penyediaan fasilitas perhubungan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban, sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Perhubungan dengan program tingkat Kota Bandung menjadi mutlak.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai beberapa indikator sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan capaian kinerja yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada bagian keenam, yang membahas tentang pengukuran kinerja oleh pemerintah daerah yang selanjutnya kewenangan pemerintah daerah tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Dinas Perhubungan sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perhubungan di wilayah Kota Bandung mempunyai tugas dan fungsi sangat strategis. Salah satu tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang sangat strategis yaitu pelayanan di bidang transportasi yang meliputi masalah lalu lintas, parkir, angkutan, terminal, operasional petugas dan pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak lepas dari berbagai persoalan/masalah yang membutuhkan perhatian cukup serius. Diantaranya adalah masalah penanggulangan kemacetan yang dirasakan cukup signifikan di beberapa ruas jalan terutama pada jam-jam sibuk baik pada hari kerja maupun pada saat hari libur (khususnya pada saat *long week end*).

Penanganan kemacetan di Kota Bandung cukup memberikan dampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Bandung termasuk diantaranya Bandung bebas Macet. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor maka bertambah pula emisi gas buang carbon yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Hal tersebut cukup memberikan dampak pada kondisi udara bersih di Kota Bandung. Selain itu kemacetan pun berdampak pada pemborosan BBM yang dipakai kendaraan bermotor.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung khususnya di bidang transportasi melahirkan suatu tantangan dan juga peluang tersendiri. Diantara tantangan yang dihadapi adalah upaya pemecahan masalah kemacetan di tengah meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak berimbang dengan penambahan kapasitas jalan. Tantangan ini menjadi peluang tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Perhubungan untuk mengoperasikan angkutan umum massal yang mana hal ini diharapkan bisa menekan penggunaan

kendaraan pribadi untuk kembali beralih menggunakan sarana transportasi umum.

Untuk itu tidaklah berlebihan apabila pengoperasian angkutan umum massal menjadi isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang direncanakan dalam perumusan program maupun kegiatan prioritas yang perlu ditindaklanjuti. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mengoperasikan masing-masing 10 bus di 5 koridor yang melayani jalur Cibiru – Cibeureum via Soekarno Hatta, jalur Cicaheum – Cibeureum via jalur tengah, Sarijadi – Cicaheum dan Antapani – Leuwi Panjang dan Antapani – St Hall.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Untuk mengetahui kesinergian dan kesesuaian dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Bandung maka diperlukan suatu proses yang akan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Proses tersebut dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana rumusan program dan kegiatan sudah terakomodir pada rancangan awal RKPD tahun anggaran 2021 ataupun besarannya sudah cocok atau sesuai. Hasil review selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:







**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021**  
**Kota Bandung**

Nama PD : Dinas Perhubungan Kota Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>94.029.570.772</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>94.029.570.772</b>	
1	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Laporan administrasi keuangan</i>	<i>1 berkas</i>	<i>49.017.722.462</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Laporan administrasi keuangan</i>	<i>1 berkas</i>	<i>49.017.722.462</i>	
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Laporan pembayaran gaji dan tunjangan	14 laporan	49.017.722.462	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Laporan pembayaran gaji dan tunjangan	14 laporan	49.017.722.462	
2	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>936.692.200</i>	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</i>		<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>936.692.200</i>	



						<i>Perangkat Daerah</i>					
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	355 stel	440.572.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	355 stel	440.572.000	
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	3 orang	496.120.200	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	3 orang	496.120.200	
<b>3</b>	<b><i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>		<b><i>Cakupan administrasi umum perangkat daerah</i></b>	<b><i>12 laporan</i></b>	<b><i>2.727.193.230</i></b>	<b><i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>		<b><i>Cakupan administrasi umum perangkat daerah</i></b>	<b><i>12 laporan</i></b>	<b><i>2.727.193.230</i></b>	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 laporan	185.038.970	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 laporan	185.038.970	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan pengadaan alat tulis kantor	12 laporan	839.988.470	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan pengadaan alat tulis kantor	12 laporan	839.988.470	
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan	12 laporan	729.562.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan	12 laporan	729.562.150	



Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021

			Minuman					Minuman		
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	4 jenis	443.838.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	4 jenis	443.838.040
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	12 laporan	123.096.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	12 laporan	123.096.000
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	405.669.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	405.669.600
4	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	<i>2 unit</i>	<i>110.786.000</i>	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	<i>2 unit</i>	<i>110.786.000</i>



*Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021*

			<i>Daerah</i>					<i>Daerah</i>		
4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	34.248.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 unit	34.248.000
4.2	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebeulair Dinas	1 set	76.538.000	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebeulair Dinas	1 set	76.538.000
5	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	4.879.832.500	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	4.879.832.500
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan pelayanan surat menyurat	12 laporan	118.946.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan pelayanan surat menyurat	12 laporan	118.946.400
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 laporan	2.545.013.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 laporan	2.545.013.100
5.3	Penyediaan Jasa		Jumlah Laporan	12	2.215.873.000	Penyediaan Jasa		Jumlah Laporan	12	2.215.873.000



*Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021*

	Pelayanan Umum Kantor		penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	laporan		Pelayanan Umum Kantor		penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	laporan	
6	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	5.282.797.260	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	5.282.797.260
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	12 laporan	3.915.355.720	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	12 laporan	3.915.355.720
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor	3 unit	1.063.363.540	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor	3 unit	1.063.363.540
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 laporan	304.078.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 laporan	304.078.000



7	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>		<i>IKM</i>	74	31.074.547.120	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>		<i>IKM</i>	74	31.074.547.120
7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)		<b>IKM</b>	74	24.738.480.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)		<b>IKM</b>	74	24.738.480.000
7.2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Angkutan)		IKM	74	6.336.067.120	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Angkutan)		IKM	74	6.336.067.120
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas</b>	<b>15%</b>	<b>93.613.271.610</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas</b>	<b>15%</b>	<b>93.613.271.610</b>
8	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	30 dokumen	2.860.710.200	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	30 dokumen	2.860.710.200



8.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Dokumen perencanaan	30 dokumen	2.860.710.200	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Dokumen perencanaan	30 dokumen	2.860.710.200	
<b>9</b>	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase prasarana jalan yang terbangun</i>	<i>60%</i>	<i>42.429.085.383</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase prasarana jalan yang terbangun</i>	<i>60%</i>	<i>42.429.085.383</i>	
9.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana jalan yang terbangun	17 unit	3.357.378.136	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana jalan yang terbangun	17 unit	3.357.378.136	
9.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun	7 jenis	23.618.485.575	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun	7 jenis	23.618.485.575	
9.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Prasarana jalan yang dipelihara	1 unit	1.142.375.172	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Prasarana jalan yang dipelihara	1 unit	1.142.375.172	
9.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		perlengkapan jalan yang dipelihara	137 titik	14.310.846.500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		perlengkapan jalan yang dipelihara	137 titik	14.310.846.500	
<b>10</b>	<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>		<i>Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola</i>	<i>6 lokasi</i>	<i>4.383.921.751</i>	<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>		<i>Jumlah Terminal penumpang tipe C yang</i>	<i>6 lokasi</i>	<i>4.383.921.751</i>	





							<i>dikelola</i>			
10.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Tersedianya jasa kebersihan terminal	12 bulan	1.910.368.431	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Tersedianya jasa kebersihan terminal	12 bulan	1.910.368.431
10.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah terminal yang dipelihara	6 unit	2.473.553.320	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah terminal yang dipelihara	6 unit	2.473.553.320
11	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>		<i>Persentase kendaran umum yang lulus uji</i>	90,5%	6.017.231.584	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>		<i>Persentase kendaran umum yang lulus uji</i>	90,5%	6.017.231.584
11.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya sarana / prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 set	572.988.994	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya sarana / prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 set	572.988.994
11.2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Uji petik kendaraan bermotor	6 kali	86.648.905	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Uji petik kendaraan bermotor	6 kali	86.648.905
11.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya bukti lulus uji berkala kendaraan	1 set	3.747.340.200	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan		Tersedianya bukti lulus uji berkala	1 set	3.747.340.200



			bermotor			Bermotor		kendaraan bermotor		
11.4	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Sosialisasi / edukasi SOP dan kebijakan bidang perhubungan	3 kali	894.632.483	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Sosialisasi / edukasi SOP dan kebijakan bidang perhubungan	3 kali	894.632.483
11.5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpeliharanya sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 set	715.621.002					
12	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah simpang tertib lalu lintas</i>	<i>15 simpang</i>	<i>11.136.923.000</i>	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah simpang tertib lalu lintas</i>	<i>15 simpang</i>	<i>11.136.923.000</i>
12.1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Laporan pengaturan lalu lintas	12 laporan	10.255.064.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Laporan pengaturan lalu lintas	12 laporan	10.255.064.000
12.2	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD / CFN	2 laporan	881.859.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan		Laporan koordinasi penyelenggaraan	2 laporan	881.859.000



	untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		CFD / CFN			
13	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>		<i>Keselamatan jalan di persimpangan</i>	<i>5 lokasi</i>	<i>2.488.777.335</i>	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>		<i>Keselamatan jalan di persimpangan</i>	<i>5 lokasi</i>	<i>2.488.777.335</i>	
13.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Kampanye publik	4 kali	318.097.400	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Kampanye publik	4 kali	318.097.400	
13.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	220 kali	2.170.679.935	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	220 kali	2.170.679.935	
14	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang</i>		<i>Tersedianya angkutan umum massal</i>	<i>9 koridor</i>	<i>24.296.622.357</i>	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa</i>		<i>Tersedianya angkutan umum massal</i>	<i>9 koridor</i>	<i>24.296.622.357</i>	



	<i>dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>					<i>Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>					
14.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		IKM	74 indeks	24.296.622.357	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		IKM	74 indeks	24.296.622.357	
<b>JUMLAH TOTAL</b>											
					187.642.842.382					187.642.842.382	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bandung banyak menerima masukan / usulan baik dari masyarakat luas pada umumnya maupun dari kalangan tertentu pemangku kepentingan. Usulan dan masukan berbagai sumber tersebut diperoleh baik dari saluran resmi berupa musrenbang maupun disampaikan langsung/tidak langsung melalui berbagai media (surat resmi, surat kabar maupun kunjungan).

Dari beberapa usulan dan masukan tersebut ada beberapa diantaranya yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung seperti pembuatan zebra cross, jembatan penyeberangan orang, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penataan terminal, penyediaan fasilitas halte bus dan sebagainya. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:



**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Kota Bandung**

Nama PD : Dinas Perhubungan Kota Bandung

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar di kota Bandung	Terpasangnya cermin tikungan	118 unit	
			Terpasangnya zebra cross	641 m	
			Terpasangnya guard rail	1 unit	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

**P**emerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mencanangkan program keselamatan transportasi yang mana hal ini telah direspon oleh Pemerintah Kota Bandung salah satunya melalui Dinas Perhubungan. Adapun implementasi program keselamatan transportasi meliputi kelayakan pengoperasian sarana transportasi (baru mencakup kendaraan umum), ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang memadai.

Salah satu faktor keselamatan transportasi yaitu kelaikan kendaraan bermotor, hal ini telah diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung melalui uji berkala / KIR bagi kendaraan wajib uji yang terdiri dari kendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barang (untuk kendaraan pribadi plat hitam belum ada payung hukumnya). Untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini memerlukan beberapa instrumen yang terdiri dari :

a) Balai pengujian kendaraan bermotor

Untuk balai pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mengantisipasi dengan membangun gedung pengujian kendaraan bermotor yang terletak di Gede bage setelah selama ini menumpang di area milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Laswi.

b) Peralatan pengujian kendaraan bermotor

Untuk pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor secara bertahap telah diupayakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, secara rutin / berkala peralatan uji tersebut dipelihara dan dikalibrasi ulang agar menghasilkan pengujian kendaraan bermotor yang lebih presisi.

- c) Kelengkapan bukti hasil pengujian kendaraan bermotor  
Sebagai bukti bahwa kendaraan wajib uji telah lulus uji dan layak beroperasi maka diberikan kelengkapan hasil uji yaitu buku uji /KIR, tanda samping berupa stiker lengkap dengan data kendaraan dan masa berlaku uji, dan tanda uji berupa segel yang dipasang di badan kendaraan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD**

Untuk tujuan yang ingin dicapai yaitu : Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu :

1. Meningkatnya Ketertiban Berlalu Lintas
2. Meningkatnya Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi
4. Meningkatnya Mobilitas Penduduk Kota dan keselamatan angkutan
5. Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2021 ini mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dalam pencapaian visi misi yang dicanangkan Kepala Daerah Kota Bandung.

Untuk tahun 2021 ini Dinas Perhubungan Kota Bandung merencanakan 2 program 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 187.642.842.382,- yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:





**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Kota Bandung**

Nama PD : Dinas Perhubungan Kota Bandung

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar								
2 15	Urusan Wajib Perhubungan								
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	<b>Kota Bandung</b>	100%	94.029.570.772	APBD		100%	103.432.527.849
2 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan		1 berkas	49.017.722.462	APBD		1 berkas	53.919.494.708



Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021

2	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan pembayaran gaji dan tunjangan		14 laporan	49.017.722.462	APBD		14 laporan	53.919.494.708
2	2	05		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		100%	936.692.200	APBD		100%	1.030.361.420
2	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		355 stel	440.572.000	APBD		355 stel	484.629.200
2	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat		3 orang	496.120.200	APBD		3 orang	545.732.220
2	2	06		<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan administrasi umum perangkat daerah</i>		12 laporan	2.727.193.230	APBD		12 laporan	2.999.912.553
2	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan		12 laporan	185.038.970	APBD		12 laporan	203.542.867
2	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan alat tulis kantor		12 laporan	839.988.470	APBD		12 laporan	923.987.317
2	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman		12 laporan	729.562.150			12 laporan	802.518.365



Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021

2	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan		4 jenis	443.838.040	APBD		4 jenis	488.221.844
2	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		12 laporan	123.096.000	APBD		12 laporan	135.405.600
2	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah		12 laporan	405.669.600	APBD		12 laporan	446.236.560
2	2	07		<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>2 unit</i>	<i>110.786.000</i>	APBD		<i>2 unit</i>	<i>121.864.600</i>
2	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		2 unit	34.248.000	APBD		2 unit	37.672.800
2	2	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeulair Dinas		1 set	76.538.000	APBD		1 set	84.191.800
2	2	08		<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>100%</i>	<i>4.879.832.500</i>	APBD		<i>100%</i>	<i>5.367.815.750</i>



Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021

2	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan pelayanan surat menyurat		12 laporan	118.946.400	APBD		12 laporan	130.841.040
2	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik		12 laporan	2.545.013.100	APBD		12 laporan	2.799.514.410
2	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 laporan	2.215.873.000			12 laporan	2.437.460.300
2	2	09		<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100%	5.282.797.260	APBD		100%	5.811.076.986
2	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara		12 laporan	3.915.355.720			12 laporan	4.306.891.292
2	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		3 unit	1.063.363.540	<b>APBD</b>		3 unit	1.169.699.894
2	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		12 laporan	304.078.000	APBD		12 laporan	334.485.800



Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021

	Lainnya								
2 2 10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	IKM		74	31.074.547.120	BLUD		74	34.182.001.832
2 2 10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)	IKM		74	24.738.480.000	BLUD		74	27.212.328.000
2 2 10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Angkutan)	IKM		74	6.336.067.120	BLUD		74	6.969.673.832
2 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas</b>		<b>15%</b>	<b>93.613.271.610</b>	APBD		<b>15%</b>	<b>102.974.598.771</b>



*Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021*

2	2	01	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>		30 dokumen	2.860.710.200	APBD		30 dokumen	3.146.781.220
2	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan	30 dokumen	2.860.710.200	APBD		30 dokumen	3.146.781.220
2	2	02		<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase prasarana jalan yang terbangun</i>	60%	42.429.085.383	APBD		60%	46.671.993.921
2	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang terbangun	17 unit	3.357.378.136	APBD		17 unit	3.693.115.950
2	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun	7 jenis	23.618.485.575	APBD		7 jenis	25.980.334.133



Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021

2	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Prasarana jalan yang dipelihara		1 unit	1.142.375.172	APBD		1 unit	1.256.612.689
2	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	perlengkapan jalan yang dipelihara		137 titik	14.310.846.500	APBD		137 titik	15.741.931.150
2	2	03		<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola</i>		<i>6 lokasi</i>	4.383.921.751	APBD		<i>6 lokasi</i>	4.822.313.926
2	2	03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya jasa kebersihan terminal		12 bulan	1.910.368.431	APBD		12 bulan	2.101.405.274
2	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara		6 unit	2.473.553.320	APBD		6 unit	2.720.908.652
2	2	05		<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Persentase kendaran umum yang lulus uji</i>		<i>90,5%</i>	6.017.231.584			<i>90,5%</i>	6.618.954.742
2	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Tersedianya sarana / prasarana pengujian		1 set	572.988.994	<b>APBD</b>		1 set	630.287.893



Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021

	Berkala Kendaraan Bermotor	kendaraan bermotor							
2 2 05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Uji petik kendaraan bermotor		6 kali	86.648.905	APBD		6 kali	95.313.796
2 2 05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor		1 set	3.747.340.200	APBD		1 set	4.122.074.220
2 2 05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi / edukasi SOP dan kebijakan bidang perhubungan		3 kali	894.632.483	APBD		3 kali	984.095.731
2 2 05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor		1 set	715.621.002	APBD		1 set	787.183.102
2 2 06	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah simpang tertib lalu lintas</i>		<i>15 simpang</i>	<i>11.136.923.000</i>	<i>APBD</i>		<i>15 simpang</i>	<i>12.250.615.300</i>
2 2 06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Laporan pengaturan lalu lintas		12 laporan	10.255.064.000			12 laporan	11.280.570.400





Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021

		Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
2	2	06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD / CFN		2 laporan	881.859.000		2 laporan	970.044.900
2	2	08		<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	<i>Keselamatan jalan di persimpangan</i>		5 lokasi	2.488.777.335	APBD	5 lokasi	2.737.655.069
2	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kampanye publik		4 kali	318.097.400	APBD	4 kali	349.907.140
2	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah penertiban angkutan dijalan raya		220 kali	2.170.679.935	APBD	220 kali	2.387.747.929



Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021

2	2	09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum massal		9 koridor	24.296.622.357	APBD		9 koridor	26.726.284.593
2	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	IKM	74 indeks	24.296.622.357	APBD		74 indeks	26.726.284.593
				<b>Jumlah Total</b>			<b>187.642.842.382</b>				<b>206.407.126.620</b>



*Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021*

---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan.

Upaya untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Perhubungan yang dibarengi dengan semangat kebersamaan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan.

Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021 untuk memberikan gambaran tentang rencana Kerja Dinas Perhubungan 1 (satu ) tahun kedepan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun program kerja yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah Kota Bandung serta digunakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menyelenggarakan jasa transportasi sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk menciptakan Kota Bandung yang bermartabat.

Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, pelaksanaan program / kegiatan dan pencapaian visi misi Daerah tetap menjadi prioritas utama bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam pelaksanaan kegiatan tentu akan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku demikian pula dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang senantiasa mengedepankan

kepentingan masyarakat banyak pada umumnya dan pengguna jasa transportasi pada khususnya.

Sebagai catatan penting bahwa upaya Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi semua permasalahan terkait tugas pokok dan fungsinya, maka sebagai rencana tindak lanjut akan tetap berkoordinasi dengan semua stake holder terkait dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk dapat mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Berkaitan dengan isu perencanaan berbasis gender, maka Dinas Perhubungan akan menganggarkannya pada kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal yang mana akan dipakai untuk perbaikan ruang tunggu penumpang khusus wanita. Sehingga secara pro aktif Dinas Perhubungan Kota Bandung telah ikut berpartisipasi dan berperan aktif menghadapi isu strategis berbasis gender.